

Jurnal Budget

Vol. 3, No. 1, 2018

ISSN 2541-5557

Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian DPR RI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

JURNAL BUDGET

Penanggungjawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Martha Carolina, S.E., Ak., M. Ak.

Rendy Alvaro, S.Sos

Ratna Christianingrum, S. Si., M.Si.

Editor

Ade Nurul Aida, S.E

Sekretariat

Mardi Harjo, S.E., M.Si.

Memed Sobari

Musbiyatun

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Buletin ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Ilmiah Jabatan Fungsional Analis APBN yang bernama "**Budget**" kembali terbit dan memasuki volume ketiga. Jurnal Budget Volume 3 Edisi 1 merupakan hasil dari proses redaksional dan penulisan yang dimulai dari awal tahun 2018 hingga terbit pada bulan Juli 2018.

Terbitan Jurnal Budget ini merupakan hasil kerja redaksi, para Analis APBN dari Pusat Kajian Anggaran, para Peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sebagai penulis utama, dan tentunya pimpinan Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI beserta jajarannya. Redaksi tetap memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan dan menentukan tata kelola yang terbaik serta ikut berkontribusi dalam jurnal **Budget** ini.

Jurnal **Budget** dalam setiap terbitan berisi materi yang membahas seputar permasalahan dalam keuangan negara yang merupakan lingkup tugas dari Jabatan Fungsional Analis APBN. Sebagai output yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI maka diharapkan materi yang disajikan didalamnya, meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik, namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan anggota parlemen, khususnya Anggota DPR RI.

Meskipun telah mencapai volume ketiga, jurnal kami pastilah tak luput dari kekurangan. Untuk itu, selanjutnya Redaksi mengharapkan masukan terbuka dari semua pihak atau *stakeholders*, demi perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal sebagaimana harapan kita semua.

Redaksi berharap semoga artikel-artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal ini mampu memberikan manfaat bagi analis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak-pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait isu-isu keuangan negara

Dewan Redaksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jurnal Budget

Vol. 3, No. 1, 2018

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Dampak Utang Pemerintah Pusat terhadap Keberlanjutan Fiskal Indonesia Periode 1998 – 2017	
<i>Rastri Paramita dan Jesly Yuriaty Panjaitan.....</i>	1
Daya Saing Kakao Indonesia di Pasar ASEAN Pra dan Paska Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN	
<i>Rendy Alvaro dan Robby A. Sirait.....</i>	29
Pengaruh Program Cetak 1 Juta Ha Sawah Baru terhadap Produksi Padi dan Kesejahteraan Petani	
<i>Dahiri.....</i>	53
Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Daerah Tertinggal	
<i>Marihot Nasution dan Ade Nurul Aida.....</i>	73
Pengaruh Variabel Ruang Fiskal, DAU dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintah Provinsi	
<i>Slamet Widodo.....</i>	91

Dampak Utang Pemerintah Pusat terhadap Keberlanjutan Fiskal Indonesia Periode 1998 - 2017

Rastri Paramita dan Jesly Yuriaty Panjaitan

Ringkasan

Sejak tahun 2014, defisit APBN memiliki kecenderungan meningkat hingga tahun 2017. Kondisi ini sejalan dengan pembangunan sektor riil yang menjadi program primadona pemerintah saat ini untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus mampu mengendalikan kendala anggaran agar konsep solvabilitas keuangan dan keberlanjutan fiskal dapat tercapai (Marks,2004). Karena, konsep keberlanjutan fiskal menurut Burnside (2005:11), sangat berkaitan dengan solvabilitas (*solvency*) tingkat utang dan keuangan pemerintah. Solvabilitas mengacu kepada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang tanpa menyebabkan kegagalan bayar (*default*) di masa mendatang sehingga membutuhkan adanya penyesuaian utang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keuangan pemerintah harus memenuhi kondisi solven dan likuid dalam memenuhi kewajibannya membayar utang.

Pada penelitian ini, penulis mengkaji seberapa besar dampak dari utang Pemerintah Pusat terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia periode 1998-2017, pengaruh rasio utang Pemerintah Pusat terhadap PDB, inflasi, suku bunga riil, dan pertumbuhan ekonomi terhadap keseimbangan primer sebagai proksi dari keberlanjutan fiskal. Penelitian ini menggunakan dua metode. Pertama, metode kuantitatif dengan pendekatan metode akuntansi untuk mengetahui keberlanjutan fiskal Indonesia periode tahun 1998 – 2017 dan metode VECM sebagai alat yang menggambarkan pengaruh rasio utang Pemerintah Pusat terhadap PDB, inflasi, suku bunga riil, dan pertumbuhan ekonomi terhadap keseimbangan primer. Kedua, metode kualitatif dengan menggunakan tiga rasio, yaitu rasio utang terhadap PDB, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan, dan rasio keseimbangan primer terhadap PDB. Simpulan dari penelitian ini adalah, terjadi *fiscal unsustainability* di Indonesia periode tahun 1998-2017. Pengaruh rasio utang Pemerintah Pusat terhadap PDB, inflasi, suku bunga riil, dan pertumbuhan ekonomi terhadap keseimbangan primer adalah positif, jadi jika keempat variabel tersebut meningkat, maka keseimbangan primer meningkat yang disebabkan oleh stok utang yang naik. Sedangkan ketiga rasio yang digunakan dapat menjadi indikator awal terjadinya ketidakstabilan fiskal yang harus segera diatasi.

Daya Saing Kakao Indonesia di Pasar Asean Pra & Paska Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean

Rendy Alvaro dan Robby A. Sirait

Ringkasan

Era perdagangan bebas di negara-negara ASEAN dimulai dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal tahun 2016. Diberlakukannya MEA, menandakan bahwa dihilangkannya hambatan terhadap arus barang antar negara-negara ASEAN, selain arus modal, investasi dan tenaga kerja terlatih. Untuk itu, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk dapat mengantisipasi dan memanfaatkan pemberlakuan MEA sehingga memperoleh manfaat bagi perekonomian nasional. Salah satu yang harus dipersiapkan oleh pemerintah adalah memastikan bahwa komoditi ekspor unggulan yang dipasarkan di pasar ASEAN, minimal mampu mempertahankan pangsa pasar dan daya saingnya serta mampu melakukan penetrasi pasar. Penelitian ini bertujuan meneliti tentang daya saing kakao Indonesia sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan di pasar ASEAN, sebelum dan sesudah penerapan MEA, serta memetakan siapa pesaing Indonesia. Penelitian ini menggunakan Analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Export Product Dynamics* (EPD). Sedangkan untuk menganalisis pesaing Indonesia di pasar ASEAN, menggunakan analisis *Market Share* (MS).

Hasil penelitian menemukan bahwa kakao dengan kode HS-180100 memiliki daya saing di Malaysia dan Filipina namun tidak di Singapura. Paska penerapan MEA, daya saing kakao Indonesia mengalami penurunan di Malaysia. Sedangkan di Filipina, pada tahun 2016 daya saingnya mengalami peningkatan namun menurun di 2017. Untuk kakao dengan kode HS-180310 memiliki daya saing di Thailand, Malaysia, dan Filipina sejak tahun 2012, sedangkan di Myanmar baru berdaya saing pada 2017. Di Singapura, jenis kakao ini tidak berdaya saing. Paska penerapan MEA, daya saing kakao tersebut mengalami penurunan di Thailand, Malaysia dan Filipina. Kakao dengan kode HS-180500 memiliki daya saing di Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam. Setelah pemberlakuan MEA, daya saing kakao tersebut mengalami pertumbuhan di Thailand, Malaysia, Singapura dan Vietnam pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017, daya saing kakao jenis ini mengalami penurunan yang tajam di negara Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Kakao dengan kode HS-180320 memiliki daya saing di Malaysia, Filipina dan Singapura sejak tahun 2012. Namun paska penerapan MEA, daya saing kakao jenis ini di Malaysia dan Filipina mengalami penurunan. Sedangkan di Singapura, daya saingnya cenderung mengalami pertumbuhan.

Pengaruh Program Cetak 1 Juta Ha Sawah Baru terhadap Produksi Padi dan Kesejahteraan Petani

Dahiri

Ringkasan

Upaya mewujudkan kedaulatan pangan pemerintah merumuskan kebijakan peningkatan produksi pangan pokok (padi) dengan perluasan luas lahan sawah melalui program cetak 1 juta ha sawah baru, stabilisasi harga pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan para pelaku usaha pangan (petani). Luas lahan sawah dan produksi padi setiap tahunnya menunjukkan tren meningkat, tapi harga cenderung fluktuatif dan kesejahteraan petani tanaman pangan semakin menurun. Hal tersebut memberikan sinyal negatif terhadap pengelolaan sektor pertanian yang selama ini dilakukan.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertama luas lahan sawah dan produktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi, kedua luas lahan sawah, produktivitas, dan harga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petani, tetapi hanya luas lahan yang signifikan, ketiga program cetak 1 juta ha sawah baru tidak efektif, keempat peningkatan produksi kurang efektif karena ada indikasi kurang akuratnya data luas lahan sawah nasional dan produktivitas masih rendah, kelima mahal biaya produksi dan subsidi bibit maupun pupuk cenderung belum sesuai kebutuhan petani sehingga menjadi pemicu turunnya kesejahteraan petani. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan perlu membuat Perpres sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Program Cetak 1 juta ha sawah perlu diiringi dengan transmigrasi penduduk sebagai upaya memperluas luas lahan sawah per kapita, meningkatkan produktivitas padi dengan belajar kepada negara yang memiliki produktivitas di atas Indonesia, dan meningkatkan efisiensi biaya produksi dengan meningkatkan efektivitas subsidi sesuai kebutuhan petani dan kondisi lahan.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Daerah Tertinggal

Marihot Nasution dan Ade Nurul Aida

Ringkasan

Otonomi daerah yang diwujudkan dalam alokasi dana desa ternyata belum dapat mengurangi ketimpangan yang ada di Indonesia, terutama jika menyangkut daerah tertinggal. Penelitian ini menguji dampak dana desa pada kondisi perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan daerah selama tiga tahun diberlakukannya dana desa bagi daerah tertinggal. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa dana desa tidak berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi jika pemberdayaan masyarakat masih lemah. Selama dana desa diberlakukan, fokus desa masih pada peningkatan pembangunan infrastruktur, belum pada pemberdayaan masyarakat yang jika dilakukan nantinya dapat berdampak pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut terjadi meskipun dalam amanah peraturan perundang-undangan telah disebutkan bahwa fokus dana desa tidaklah hanya pada pembangunan infrastruktur namun juga pemberdayaan masyarakat. Penyeimbangan pemanfaatan dana desa oleh desa sendiri perlu diberlakukan, karena pembangunan infrastruktur tanpa pemberdayaan akan berdampak pada makin tingginya ketimpangan di desa nantinya, karena pihak yang mampu memanfaatkan pembangunan lebih optimal hanyalah pihak yang berdaya.

Pengaruh Variabel Ruang Fiskal, DAU dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintah Provinsi

Slamet Widodo

Ringkasan

DAU dan DBH merupakan bagian dari komponen transfer ke daerah dan menjadi sumber bagi peningkatan ruang fiskal daerah. Ruang fiskal mencerminkan seberapa besar keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menentukan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal, semakin besar keleluasaan daerah dalam membiayai belanja daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah Indeks Pembangunan Manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ruang fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi. Data yang digunakan data IPM, ruang fiskal, DAU, dan DBH periode 2006-2015 yang bersumber dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Alat analisis menggunakan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* dengan estimasi *Ordinary Least Square*. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel ruang fiskal, DAU dan DBH berpengaruh signifikan terhadap IPM pemerintah provinsi dengan arah negatif.